

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayuningtias, D. (2008) 'Kotak Hitam Sistem Penetapan Kebijakan dan Faktor yang Mempengaruhinya', *Jurnal manajemen pelayanan kesehatan*, 11(02), pp. 44–48.
- Azwar, A. and Prihartono, J. (2003) 'Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat, Batam', in *Binarupa Akara*.
- Boland, P. (1996) *The Capitation Sourcebook: A Practical Guide to Managing At-risk Arrangements*. Jones & Bartlett Learning.
- Buse, K. (2007) 'Making Health Policy, Membuat Kebijakan Kesehatan. London: London School of Hygiene and Tropical Medicine. Diterjemahkan oleh Panca dkk.'
- Darminto (2002) 'Darminto, Dwi Prastowo, Julianti R. (2002). Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.'
- Depkes. Direktorat Jenderal JPKM (2005) 'Standar dan Modul: Pelatihan Teknis Perhitungan Unit Cost Pelayanan Kesehatan PPK Primer dalam Penyelenggaraan JPK (pp. 66 – 74). Jakarta: Departemen Kesehatan RI.'
- Dewi, R. (2016) *Implementasi Pembayaran Kapitasi Jkn Di Puskesmas Tahun 2014 Dan 2015 : Perbandingan Di Daerah Tertinggal Dan Non Tertinggal*. UGM.
- Dinkes Kabupaten Bengkulu Utara (2017) *Profil Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara*.
- Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, kementerian kesehatan (2018) 'Pemantauan masalah dan rekomendasi perbaikan kebijakan terkait belanja strategis jkn untuk layanan kesehatan primer bagi daerah sulit dan terpencil', *kesehatan*.
- Fritz, V. and Menocal, A. R. (2007) 'Developmental States in the New Millennium : Concepts and Challenges for a New Aid Agenda', 25(5), pp. 531–552.
- Grindle, M. S. (2007) 'Good Enough Governance Revisited', 25(5), pp. 553–574.
- Haedar, A. (2010) 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Ilmu Administrasi Publik. vol 1. no 1. hal. 1-11.'
- Haryata, A. R. (2005) *Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Limbah Cair Rumah Sakit Di Kota Yogyakarta*. UGM.

Hendrartini, J. (2010) *Model Kinerja Dokter Dengan Pembayaran Kapitasi Dalam Program Asuransi Kesehatan*. UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Irwan (2005) *Persepsi Stakeholder Terhadap Pembiayaan Kesehatan Keluarga Miskin Dengan Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Di Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah*. UGM.

Januraga, P. putu, Suryawati, C. and Arso, S. pawelas (2009) ‘Persepsi Stakeholder terhadap latar belakang subsidi premi, sistem kapitasi dan pembayaran premi program jaminan kesehatan jembrana’, *jurnal manajemen pelayanan kesehatan*, 12(01), pp. 33–40.

Kamarudin (2008) *Persepsi Stakeholder Dalam Implementasi Desa Siaga Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi*. UGM.

Karyati, M. (2004) *Tingkat kepuasan dokter keluarga terhadap sistem pembayaran kapitasi pt. askes di kota medan*. Universitas Gadjah Mada.

Kemenkes (2016a) ‘Permenkes No.52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan’, *Regulation National Archive*, p. 912.

Kemenkes (2016b) *PERMENKES NOMOR 90 TAHUN 2015 Tentang Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan di fasilitas kesehatan kawasan terpencil dan sangat terpencil*. Indonesia.

Koduah, A., Dijk, H. Van and Agyepong, I. A. (2016) ‘Technical analysis , contestation and politics in policy agenda setting and implementation : the rise and fall of primary care maternal services from Ghana ’ s capitation policy’, *BMC Health Services Research*. BMC Health Services Research, pp. 1–14. doi: 10.1186/s12913-016-1576-2.

Kullberg, L., Blomqvist, P. and Winblad, U. (2018) ‘Market-orienting reforms in rural health care in Sweden: how can equity in access be preserved?’ *International Journal for Equity in Health*, pp. 1–14.

Kutzin, J. (2013) ‘Health financing for universal coverage and health system performance : concepts and implications for policy’, *Policy & Practice*, (May), pp. 602–611. doi: doi: <http://dx.doi.org/10.2471/BLT.12.113985>.

Latar, R. (2014) ‘Kesiapan Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Kota Tual’, *kesehatan*, pp. 1–14.

Lawson, K. (2003) ‘The human polity: A comparative introduction to political science.’, *Houghton Mifflin Company*.

Lopoelisa, L. G. (2015) *Analisis persepsi stakeholder terhadap sistem jaminan pemeliharaan kesehatan karyawan di rumah sakit yayasan kristen untuk kesehatan umum (yakkum)*.

Menteri Keputusan (2017) *Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*. Indonesia.

- Notoadmodjo, S. (2003) 'Pendidikan dan Perilaku Kesehatan', in *Rineka Cipta*.
- Pang, B. and Lee, L. (2005) 'Seeing stars: Exploiting class relationships for sentiment categorization with respect to rating scales', (June), pp. 115–124.
- Permenkes RI No.12 (2016) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan*.
- Permenkes RI No.21 (2016) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah*.
- Permenkes RI No.28 (2014) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Permenkes RI No.6 (2013) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil, Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati*.
- Permenkes RI No.71 (2013) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional*.
- Prativi, A. N. (2015) 'Analisis Kesiapan Puskesmas Sebagai Provider Bpjs Kesehatan (Studi Di Puskesmas Kedungmundu Dan Puskesmas Tlogosari Kulon)', *JURNAL KESEHATAN MASYARAKAT (e-Journal)*, 3(April), pp. 1–10.
- Presiden RI (2015) 'PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2015-2019', *hukum online*, pp. 2–4.
- Presiden RI, P. (2013) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan*.
- Pusat KPMK UGM (2018) 'Kajian Efektifitas Sistem Pembayaran Dengan Kapitasi Khusus Di Daerah Terpencil Tahun 2018'.
- Rai, M. I. G. A. (2008) *Komitmen Stakeholder Terhadap Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis Puskesmas Di Kota Denpasar Bali*. UGM.
- Retnowati (2007) *Persepsi Stakeholder Tentang Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Kupang Provinsi NTT*.
- Robins, S. P. (2001) *Perilaku Organisasi (jilid 1). Edisi 8, Jakarta: Pearson Education Asia Pte., Ltd. dan PT Prenhallindo*.
- Safriantini, D. (2014) *Analisis Besaran Biaya Kapitasi Dan Premi*

*Programjaminankesehatanpt. Jamsostek Berdasarkan Biaya Klaim Dan Utilisasi Pelayanan (Studi Kasus Pt.Jamsostek Daerah Istimewa Yogyakarta).* UGM.

Salsabilah, K. (2009) *Persepsi Stakeholder Terhadap Kebijakan Pembiayaan Alat Bantu Belajar Mengajar Peralatan Di Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Depkes Pontianak.*

Saparwati, M. (2012) ‘Studi Fenomenologi: Pengalaman Kepala Ruang dalam Mengelola Ruang Rawat Inap di RSUD Ambarawa. Diss.’

Sari Purnama, D. (2018) ‘Apa Makna “Keuntungan” Bagi Profesi Dokter’, *Akuntansi Multiparadigma.*

Sihab, A. (2012) ‘Shihab, A. Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.Jurnal Legislasi Indonesia. 2012; 9(2): 175-190’, 9.

Stotland, N. L. (2003) ‘Abortion and psychiatric practice’, *Journal of Psychiatric Practice*, pp. 139–149.

Sundari, R. T. (2013) *Persepsi Stakeholder Terhadap Kebutuhan Anggaran Berbasis Premi Pada Program Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Cirebon.*

Sundewall, J. *et al.* (2010) ‘Stakeholder perceptions of aid coordination implementation in the Zambian health sector’, *health policy*, 95, pp. 122–128. doi: 10.1016/j.healthpol.2009.11.010.

Suriasumantri, J. S. (2003) ‘Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, cet XVII, Jakarta’, in *Pustaka Sinar harapan.*

Triprasetya, A. S. (2014) *Analisis Kesiapan Penerapan Kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (Blud) Puskesmas Di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus Di Puskesmas Wates Dan Puskesmas Girimulyo Ii Kabupaten Kulon Progo).* UGM.

UU RI (2004) ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional’, *hukum online*, pp. 1–29.

UU RI (2014) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*